

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Semakin meningkatnya perkembangan ekonomi menyebabkan tingginya tindak kejahatan di dalam berbagai hal. Dalam istilah perekonomian tindakan ini disebut sebagai kecurangan atau *fraud*. Kecurangan atau *fraud* dapat diartikan sebagai rancangan berbagai cara memalsukan informasi ataupun kebenaran (Black, 1968). Tindak kecurangan yang dilakukan dengan sengaja bertujuan untuk memenuhi keuntungan pribadi (Alzoubi & Jaaffar, 2021).

Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan individu maupun kelompok dan dapat mengakibatkan kerugian (Lukman & Harun, 2018). Dalam dunia akuntansi, kecurangan (*fraud*) biasa dikenal dengan penggelapan uang yang bertentangan dengan peraturan yang ada. Kecurangan terdiri dari tiga jenis yaitu *pertama*, kecurangan aset termasuk pencurian aktiva entitas; *Kedua*, kecurangan laporan keuangan salah saji, pernyataan yang tidak benar tentang laporan keuangan yang salah, atau pengungkapan atau pengabaian yang disengaja untuk menipu pengguna laporan keuangan; *Ketiga*, Korupsi adalah ketika seseorang menyalahgunakan posisi pemerintah untuk kepentingan pribadi. Istilah kecurangan atau *fraud* lebih dikenal dengan korupsi. Salah satu bentuk kecurangan korupsi yaitu mencakup pencatatan yang salah, penghilangan dokumen, yang merugikan keuangan perusahaan. Pencegahan kecurangan (*fraud*) sangat dibutuhkan untuk mengatasi peningkatan kasus korupsi keuangan rentan terhadap penipuan karena memberikan informasi

penting yang mungkin diinginkan oleh suatu perusahaan atau pihak lain. Di Indonesia, penipuan telah menarik perhatian beberapa organisasi, khususnya yang terlibat di pemerintahan. Kasus penipuan di instansi pemerintah melibatkan bawahan dan orang-orang yang menduduki jabatan lebih tinggi. Biasanya, keinginan untuk memamerkan atau menawarkan catatan keuangan yang bagus atau laporan keuangan yang berlimpah adalah pemicu penipuan ini. Selain itu, penipuan dapat terjadi karena ada kemungkinan untuk melakukan penipuan.

Salah satu bentuk kecurangan di Indonesia yaitu berdasarkan data yang dilihat dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) negara Indonesia yang mengalami kerugian dikarenakan adanya tindakan korupsi yang dilakukan pada tahun 2020 yang ditafsir mencapai Rp 56,7 Triliun (Gurinto,2021). *Corruption Perception Index* (CPI) mengukur hasil pada tahun 2021 Indonesia mempunyai skor 38 dan berada di posisi urutan ke 96 dari 180 negara yang di survey *Transparency International* pada tahun 2021. Hasil ini menunjukkan bahwa negara Indonesia termasuk negara yang memiliki tingkat korupsi yang tinggi sehingga upaya pencegahan kecurangan masih belum dapat terlaksana dengan baik karena masih berada di urutan yang cukup tinggi dalam hal korupsi. Pencegahan kecurangan atau dikenal sebagai *fraud deterrence*, terdiri dari segala usaha yang dilakukan untuk membuat pelaku kecurangan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya atau, jika terjadi, maka dampaknya sangat kecil.

Pada semester I 2022, ICW menelusuri perkembangan penindakan korupsi dan menemukan 612 orang yang terlibat dalam 252 peristiwa korupsi telah ditetapkan sebagai tersangka dengan potensi kerugian negara sebesar Rp33,6

triliun. Pemantauan ini tidak hanya digunakan untuk memetakan kasus korupsi, namun juga untuk mengkaji kinerja kepolisian, kejaksaan, dan penyidikan KPK. Data pemantauan menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak selalu ditangani dengan cara yang paling efektif. Pada semester I 2022, sebanyak 1.387 perkara telah diproses sehingga memenuhi target Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022. Dari jumlah kasus yang diusut, penegak hukum hanya menangani 18 kasus saja. % dari target, atau nilai E yang merupakan nilai buruk (ICW., 2022). Data pemantauan menunjukkan bahwa kasus korupsi tidak selalu ditangani dengan cara yang paling efektif. Pada semester I 2022, total kasus yang diproses sebanyak 1.387 kasus dan memenuhi target Daftar Isi Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

Adapun kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Deli Serdang yaitu terjadinya tindak korupsi di salah satu OPD Kabupaten Deli Serdang yaitu pada Dinas Kesehatan. Kasus korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala Dinas Kesehatan yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh pihak kejaksaan dan diduga melakukan tindak korupsi Jasa Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Belanja Modal Kesehatan pada Dinas Kesehatan Deli Serdang dengan total kerugian negara senilai Rp 725.478.290 pada tahun 2021.

Ini adalah salah satu contoh kasus kecurangan yang disebabkan oleh kurangnya kontrol internal pemerintah. Salah satu faktor yang menyebabkan tindak kecurangan adalah peluang dan lemahnya pengawasan serta pengendalian internal. Ini adalah faktor yang dapat dilakukan oleh manajemen maupun karyawan dalam upaya meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mencegah

terjadinya kecurangan. Sistem pengendalian internal pemerintah memastikan bahwa organisasi harus mematuhi peraturan yang berlaku.

Menurut *The Committee on Sponsoring The Treadway Committee* (COSO) pengendalian internal adalah langkah yang dilakukan oleh manajemen dalam sebuah organisasi yang dibuat agar sesuatu dapat terlaksana sesuai dengan yang direncanakan. Menurut (Tuanakota, 2010) sistem pengendalian internal adalah proses dan tata aturan yang disusun dan diterapkan dengan maksud dan tujuan, jika bukan satu-satunya, mencegah dan menanggulangi kecurangan. Pentingnya pengembangan dari sistem pengendalian internal harus dianggap serius dan layak untuk menjadi salah satu prioritas di dalam pemerintahan (Urbanik, 2016). Hasil riset oleh Vernanda & Ilham (2021) menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan laporan keuangan. Berdasarkan temuan penelitian Gusnardi (2013), kecurangan laporan keuangan dipengaruhi secara negatif oleh sistem pengendalian internal. Lebih lanjut, sistem pengendalian tersebut berdampak buruk pada pemalsuan laporan keuangan pemerintah daerah, menurut penelitian Fitri & Tri.

Selain sistem pengendalian internal pemerintah yang perlu berjalan dengan baik, audit internal juga sangat penting dalam pencegahan kecurangan (*fraud*).

Untuk menghasilkan hasil yang baik dan audit internal yang baik, diperlukan pengawasan. Audit internal adalah tindakan independen yang bertujuan untuk memberi kepercayaan serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan nilai dan mengoptimalkan aktivitas operasional organisasi. Tinjauan internal yang tidak memihak yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk mengevaluasi operasinya

disebut audit internal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan tanggung jawab yang diberikan telah diselesaikan dengan baik atau belum. Auditor internal harus melakukan evaluasi, inspeksi, dan pencarian fakta untuk mendukung tindakan manajemen selanjutnya guna mencapai tujuan ini. Salah satu hasil auditor internal adalah penemuan kecurangan (Marfiana & Gunarto, 2021). Menurut definisi Sawyer dalam bukunya Sawyer's Internal Auditing, "auditor internal melakukan evaluasi secara metedis dan obyektif terhadap berbagai operasi dan pengendalian organisasi untuk memastikan bahwa: (1) seluruh informasi keuangan dan operasional akurat dan dapat diandalkan; (2) potensi ancaman bisnis telah diidentifikasi dan dimitigasi; (3) telah mematuhi standar dan protokol internal yang ditetapkan; (4) telah terpenuhinya standar operasional yang memadai; (5) sumber daya telah digunakan secara bijaksana dan efisien; dan (6) seluruh tujuan organisasi telah berhasil dicapai." (Sari & Nugroho, 2017).

Audit internal adalah bagian utama dalam perkembangan suatu organisasi khususnya di pemerintahan. Audit internal digunakan untuk membantu operasi manajemen dan menjamin bahwa organisasi berjalan sesuai perencanaan dan mencapai tujuan. Audit internal yang efektif memastikan bahwa organisasi siap untuk kemajuan yang akan datang serta mengantisipasi perubahan ekonomi yang cepat. Jika audit internal perusahaan atau instansi lemah atau tidak memadai, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kecurangan. Sebaliknya, jika audit internal yang baik dan berkualitas tinggi akan meningkatkan kinerja perusahaan dan instansi serta mengurangi kemungkinan kecurangan.

Audit internal secara teratur menilai dan meningkatkan proses pengelolaan risiko, pengendalian, dan governance, yang membantu perusahaan mencapai tujuannya (Bromilow & Keller, 2011). Audit internal memantau aktivitas dan memastikan program pengendalian berjalan dengan baik serta mencegah dan mendeteksi kecurangan. Untuk mencapai hal ini, Audit internal harus melaksanakan pemeriksaan, penilaian, dan menemukan bukti atau fakta untuk diserahkan kepada manajemen.. Pelaksanaan pemeriksaan internal dilakukan di berbagai lingkungan, dan tujuan, aturan, dan praktik organisasi yang berbeda mempengaruhi pelaksanaan internal di masing-masing lingkungan.

Menurut temuan penelitian Abdi (2017), audit internal berdampak buruk terhadap kecurangan. Luh, Lilik, dan Hermanto (2019) menemukan bahwa audit internal berdampak buruk terhadap kasus penipuan. Audit internal yang dilakukan secara optimal dapat membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan.

Penelitian ini merupakan kajian ulang terhadap penelitian sebelumnya mengenai pengaruh sistem pengendalian internal, moralitas, dan motivasi terhadap kecurangan laporan keuangan oleh Indra Firmansyah (2020). Terdapat perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya dilaksanakan pada PT Perkebunan Nusantara VIII yang dijadikan sebagai tempat penelitian. Sedangkan pada penelitian ini dilaksanakan pada OPD Kabupaten Deli Serdang yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

Berdasarkan yang telah disebut diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Audit Internal Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Indonesia corruption watch (ICW) mendapatkan adanya kasus kecurangan di sektor pemerintah yang meningkat. Dengan pemantauan ICW pada tahun 2022, ICW mencatat adanya 612 orang yang terlibat dalam 252 kasus korupsi yang ditetapkan sebagai tersangka dan potensi kerugian negara mencapai Rp 33,6 Triliun.
2. Terjadinya kasus kecurangan yaitu korupsi yang dilakukan oleh mantan kepala dinas Kesehatan yang melakukan tindak korupsi jasa konsultasi perencanaan dan konsultasi pengawasan belanja modal Kesehatan pada dinas Kesehatan Deli Serdang dengan total kerugian negara senilai Rp 727.478.290 pada tahun 2021.

1.3 Batasan Masalah

Permasalahan yang hendak dikaji apabila mengacu pada identifikasi masalah ialah berfokus pada hal berikut:

1. Batasan masalah hanya memiliki fokus pada pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan audit internal terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Penentuan cakupan objek penelitian dibatasi pada seluruh OPD di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat dibuat sebagai berikut berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas:

1. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
2. Apakah audit internal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?
3. Apakah sistem pengendalian internal pemerintah dan audit internal berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan ?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan uraian masalah di atas maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecurangan laporan keuangan.
2. Untuk mengetahui pengaruh audit internal terhadap kecurangan laporan keuangan.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dan audit internal terhadap kecurangan laporan keuangan.

1.6 Manfaat Penelitian

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharap mampu memberikan ilmu pengetahuan serta informasi mengenai kecuranbgan laporan keuangan pada OPD di Kabupaten Deli Serdang.

2) Bagi Universitas Negeri Medan

Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai tinjauan literatur dan sumber informasi tambahan bagi mahasiswa akuntansi yang melakukan penelitian relevan.



THE
Character Building
UNIVERSITY